

■ Hasil Penelusuran Kemendagri

2 Ribu Rekening Pejabat Terindikasi Korupsi

Kubu Raya, BERKAT.

Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim untuk menelusuri rekening pejabat baik di pusat maupun daerah. Hasilnya, ditemukan sekitar 2 ribu rekening pejabat yang terindikasi korupsi. Dan Kemendagri juga mencurigai adanya transaksi tidak wajar pada rekening kepala daerah, bendaharawan, pimpinan proyek, dan pejabat daerah lainnya.

"Kami sudah membentuk tim khusus yang dikirim ke berbagai daerah yang

terindikasi adanya transaksi mencurigakan itu," tegas Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi usai membuka Rakerna VII/ Munaslub Apkasi di Kubu Raya, Jumat (24/6) kemarin.

Sebagian besar rekening tak wajar milik pejabat itu berpotensi merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut dia, berdasarkan laporan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, banyak transaksi mencurigakan pada rekening milik

tersangka korupsi yang tidak dilaporkan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan tidak tercatat di PPAATK.

"Karena itu kami saat ini sedang menunggu hasil laporan lengkap PPAATK terhadap indikasi penyimpangan tersebut, sebelum akhirnya mengambil langkah lanjut terhadap hal tersebut,"katanya.

Namun Ia tegaskan Kemendagri tidak akan mencampuri urusan pemeriksaan rekening pejabat yang tidak wajar mengingat hal tersebut masuk dalam

wewenang KPK dan Polri. Akan tetapi jika terkait dengan kesalahan penggunaan anggaran, maka itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina otonomi daerah. Dalam hal itu Kemendagri hanya melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pembinaan dan peringatan kepada Gubernur dan Bupati.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran daerah, Kemendagri selalu melakukan evaluasi, sebelum penggunaan anggaran oleh pejabat negara. Sedangkan untuk proses setelah evaluasi itu berada di tangan BPK. Jika ada indikasi penyimpangan, maka hal tersebut akan diserahkan kepada KPK dan Polri untuk melanjutkan pada proses pemeriksaan.

"Sebagai koordinator kita berkewajiban memberikan pembinaan tentang penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya menyangkut penyusunan dan penggunaan anggaran kepada seluruh 33 gubernur dan 524 bupati/ walikota di seluruh Indonesia," tukas Mendagri.(rob)